



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.159, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Perencanaan.
Pengembangan. Pertahanan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 05 TAHUN 2009
TENTANG
KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang: a. bahwa pada era yang diwarnai terjadinya resesi keuangan global perlu penataan struktur dan Postur Pertahanan Negara yang berkesinambungan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg);
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara;
10. Surat Menteri Pertahanan Nomor : K/32/17/10/39/DJ REN tanggal 5 Februari 2009 tentang Kebijakan Perencanaan Program dan Anggaran Pertahanan Tahun 2010;
11. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor :

0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009 tanggal 16 April 2009 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010; dan

12. Surat Keputusan Dirjen Renhan Dephan Nomor : SKEP/252/IX/2008 tanggal 30 September 2008 tentang Naskah Sementara Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010.**

Pasal 1

Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara Tahun 2010 disusun berpedoman kepada Naskah Sementara Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 serta Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010.

Pasal 2

Prioritas pembangunan pertahanan negara berpedoman pada prioritas nasional Tahun 2010 dengan pendekatan *baseline* sehingga perumusan kebijakan, program dan kegiatan diarahkan untuk pemenuhan hak prajurit serta kebutuhan mendesak.

Pasal 3

Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara Tahun 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan termasuk hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dipedomani seluruh komunitas perencana di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia secara konsekuen dan konsisten.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2009
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL 23 April 2009

**KEBIJAKAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2009**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

- a. Pertahanan Negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah melalui usaha membangun dan membina kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa dan negara.
- b. Tahapan perencanaan pembangunan Pertahanan Nasional yang diatur di dalam Rencana Strategis (Renstra Bang Hanneg) merupakan pedoman utama yang harus diselaraskan terhadap Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun guna mengelola ancaman aktual dan potensial yang berbasis anggaran yang tersedia secara tuntas, cermat, cepat dan akurat.
- c. Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010 adalah tahun pertama pada Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara (Renstra Bang Hanneg) Tahun 2010-2014 diarahkan menuju terwujudnya Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*/MEF) dalam kerangka Postur Pertahanan Negara. Langkah implementasi yang dicanangkan dalam Pembangunan Pertahanan Negara pada Tahun 2010, difokuskan kepada pembangunan kapabilitas *standard deterrence* melalui peningkatan jumlah dan kondisi kesiapan operasional pertahanan dengan pemeliharaan, pengembangan dan penggantian Alutsista yang sudah tidak layak, modernisasi Alutsista, pengembangan sistem dan strategi pertahanan serta teknologi dan industri pertahanan dalam negeri.
- d. Dengan mencermati kompleksitas dinamika penyelenggaraan pembangunan Pertahanan Negara tersebut di atas maka perlu ditetapkan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara yang berbasis kemampuan (*Capability Based Defence*) untuk menjamin soliditas dan integritas secara terpadu dan berkesinambungan.

- 2. Maksud dan Tujuan.** Maksud dan tujuan ditetapkannya Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Tahun 2010 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010, dengan tujuan agar penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan negara di

lingkungan Dephan dan TNI, dapat dilaksanakan secara valid, objektif, transparan dan akuntabel.

3. Dasar/Referensi.

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
- g. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan.
- h. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg).
- i. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara.
- j. Surat Menteri Pertahanan Nomor : K/32/17/10/39/DJ REN tanggal 5 Februari 2009 tentang Kebijakan Perencanaan Program dan Anggaran Pertahanan Tahun 2010.
- k. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009 tanggal 16 April 2009 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010.
- l. Surat Keputusan Dirjen Renhan Dephan Nomor : SKEP/252/IX/2008 tanggal 30 September 2008 tentang Naskah Sementara Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Ruang lingkup Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan ini meliputi latar belakang perumusan kebijakan serta penetapan kebijakan menyangkut perencanaan anggaran, program pengembangan pertahanan dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan.
- b. Bab II : Landasan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara.

- c. Bab III : Perkembangan Lingkungan Strategis.
- d. Bab IV : Pokok-Pokok Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara.
- e. Bab V : Penutup.

5. Pengertian.

- a. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- b. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- c. Pertahanan militer adalah bertumpu kepada TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer.
- d. Pertahanan nirmiliter adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nirmiliter.
- e. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
- f. Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan-tindakan dimasa yang akan datang secara tepat melalui sistematika atau urutan pilihan yang benar dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- g. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) adalah jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L untuk periode 5 (lima) tahun.
- h. Rencana Pembangunan Jangka Pendek adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang juga disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tingkat K/L ke bawah.
- i. Pagu indikatif adalah perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada K/L untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renja K/L.
- j. Prioritas Nasional adalah program yang ditetapkan pemerintah dalam RKP sebagai prioritas pembangunan yang difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, keadaan yang lebih aman, adil dan demokratis.

BAB II

LANDASAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN NEGARA

6. **Landasan Idiil.** Pancasila merupakan dasar, falsafah dan ideologi negara yang berisi nilai-nilai moral dan etika yang telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa serta bernegara dan berdaya saing. Untuk itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak setiap warga negara Indonesia untuk mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
7. **Landasan Konstitusional.** UUD Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi sebagai landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Landasan ini juga mencakup sistem pertahanan negara yang menempatkan rakyat sebagai pemeran vital, bahwa pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.
8. **Landasan Yuridis.** UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur tentang penyelenggaraan pertahanan negara, pengelolaan sistem pertahanan negara dan pembinaan kemampuan pertahanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal bangsa dan negara yang pengejawantahannya melalui sistem pertahanan negara.
9. **Landasan Visional.** Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh.
10. **Landasan Konseptual.** Ketahanan Nasional merupakan geostrategi Indonesia sebagai implementasi dari kosep geopolitik wawasan nusantara dalam mewujudkan daya tangkal nasional serta mempengaruhi ketahanan regional dan supra regional.

BAB III

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

11. **Lingkungan Strategis Global.**
 - a. **Krisis Finansial Global.** Dampak krisis finansial global yang telah mulai dirasakan sejak akhir Tahun 2007, tidak merata pada setiap negara maupun kawasan, akan tetapi seluruh Negara, baik negara maju maupun berkembang tidak terkecuali terkena dampaknya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global terkoreksi cukup signifikan karena kinerja perekonomian seluruh negara mengalami kontraksi sangat tajam. Perbaikan laju pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan mulai terjadi pada Tahun 2010, meskipun demikian bagi sebagian negara dampak krisis akan tetap dirasakan setidaknya-tidaknya hingga satu dekade ke depan.

- b. Keterbatasan Energi dan Pangan.** Penambahan populasi penduduk dunia, laju roda pembangunan, dan belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi, menyebabkan sumber daya energi strategis (minyak dan gas bumi) semakin terbatas. Kondisi demikian berpengaruh terhadap dinamika ekonomi, politik dan keamanan internasional sebagai akibat masih tingginya ketergantungan pada kedua sumber daya energi tersebut. Selain itu, pertumbuhan populasi penduduk juga mempengaruhi terjadinya kenaikan harga komoditas pangan dunia, yang secara langsung mempengaruhi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di negara-negara berkembang. Kondisi ini telah memicu kerusuhan sosial di sejumlah negara, dan bahkan dapat mendorong terjadinya perang saudara hingga kudeta.
- c. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global.** Tanda-tanda perubahan iklim akibat dampak pemanasan global telah terlihat, yang ditandai dengan mencairnya es di belahan Kutub Utara terus menerus yang menyebabkan permukaan laut meningkat, terjadinya cuaca ekstrim, timbul penyakit baru, degradasi sumber daya alam, dan lainnya. Langkah-langkah global yang efektif dan konkrit dalam melakukan mitigasi pemanasan global tersebut tetap belum terlihat karena belum adanya kesamaan pandangan sekaligus kesediaan untuk berbagi beban (*burden*) dan tanggung jawab (*responsibility*) antara negara maju dan berkembang. Kondisi ini menyebabkan berbagai negara berhadapan dengan masalah lingkungan hidup dan bahkan menghadapi ancaman fisik kedaulatan.
- d. Dominasi Negara-negara Maju.** Perkembangan dunia masih dominan dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara *major powers* dalam mengamankan kepentingan nasionalnya. Akibatnya, dinamika politik dan keamanan internasional, masih bergantung pada keseriusan dan pilihan metoda negara-negara besar dalam memelihara perdamaian dan stabilitas internasional, dan mengurangi *adventurisme* politik luar negeri yang mendorong instabilitas dan gejolak di berbagai kawasan. Menguatnya interdependensi antarnegara memang telah mendorong peningkatan intensitas kerjasama internasional, akan tetapi hubungan yang simetris dengan negara-negara maju tetap ditentukan oleh preferensi dan kepentingan negara-negara tersebut.
- e. Pergeseran Keseimbangan Kekuatan.** Berkurangnya kapasitas internasional Amerika Serikat (AS) yang terjadi seiring dengan kebangkitan peran dan pengaruh sejumlah Negara, seperti Rusia, China, India, serta negara-negara Uni Eropa (UE), mendorong terjadinya pergeseran keseimbangan kekuatan dunia. Ditengah-tengah persaingan pengaruh global dan regional antara negara-negara besar, maka adaptasi terhadap kemungkinan terbentuknya tatanan dunia multipolar semakin penting, terutama bagi negara-negara berkembang, yang memiliki kapasitas dan pengaruh terbatas untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

12. Lingkungan Strategis Regional.

- a. Kawasan Amerika.** Kebijakan luar negeri dan pertahanan AS pada masa pemerintahan Barack Obama memperlihatkan pendekatan yang jauh berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Hal ini menumbuhkan harapan

publik AS dan masyarakat internasional terhadap penekanan *soft power* oleh AS yang mendukung terpeliharanya perdamaian dan stabilitas perdamaian dunia. Dalam konteks domestik, krisis finansial AS saat ini merupakan yang terburuk sejak resesi ekonomi Tahun 1930, sehingga pemulihan ekonomi menjadi prioritas negara tersebut, sejalan upaya mempertahankan pengaruh pada tingkat regional maupun global. Fenomena kebangkitan kekuatan sosialisme baru di Amerika latin, khususnya di negara-negara yang berseberangan dengan AS, seperti Venezuela, Kuba, Bolivia dan lainnya, tetap dominan, sehingga penurunan pengaruh AS di kawasan diperkirakan masih akan terus berlanjut. Meskipun peran dan pengaruh AS telah mengakar sejak lama, pergeseran orientasi politik dan ekonomi negara-negara di kawasan seiring dengan mulai masuknya pengaruh Rusia dan China, menyebabkan kawasan ini mendapat perhatian signifikan dari pihak AS, sebagaimana terlihat dengan langkah pembentukan kembali Armada Keempat (*US Fourth Fleet*).

- b. Kawasan Eropa.** Peran dan pengaruh Rusia dalam dinamika ekonomi, politik dan keamanan di kawasan terus meningkat, seiring dengan menguatnya *leverage* politik negara tersebut *vis a vis* dengan negara-negara Barat. Hal ini mendorong *adventurisme* kebijakan luar negeri dan keamanan Rusia sebagaimana terlihat dari kasus penghentian suplai gas ke Ukraina yang turut dirasakan negara-negara Eropa lainnya, serangan militer ke Georgia, serta kegigihan menentang sistem pertahanan Rudal AS di kawasan Eropa. Meski demikian, dalam perkembangan terakhir ketegangan Rusia dengan Barat terlihat mulai mencair dengan adanya gejala perbaikan hubungan negara tersebut dengan AS, UE maupun NATO. Tren bersifat positif tidak hanya bagi kawasan Eropa melainkan juga bagi dinamika politik dan keamanan internasional. Salah satu perkembangan mutakhir di kawasan Eropa adalah masuknya kembali Perancis ke dalam struktur komando militer NATO setelah mengundurkan diri pada Tahun 1966. Langkah ini secara nyata akan memungkinkan Perancis terlibat penuh dalam proses perencanaan setiap operasi NATO dan sekaligus menjadi faktor yang akan menentukan bagi upaya pembentukan pertahanan Eropa dalam kerangka UE. Dalam bidang ekonomi, kerjasama negara-negara di kawasan dalam rangka mengatasi dampak krisis finansial global cukup kuat, meskipun hasilnya tetap baru dirasakan dalam 2 hingga 5 tahun ke depan.
- c. Kawasan Afrika.** Perkembangan kawasan Afrika tetap lebih dominan diwarnai oleh permasalahan kompleks, khususnya dari segi internal, seperti krisis pangan, bencana alam, penegakan hukum, demokrasi dan HAM, kerusuhan sosial, konflik bersenjata atau perang saudara khususnya dalam proses pergantian rezim kepemimpinan, kecenderungan hadirnya kekerasan dalam politik di Afrika masih cukup kuat, sehingga rawan terjadi gejolak-gejolak yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban sipil yang cukup banyak, seperti terlihat di Burundi, Rwanda, Sudan dan Somalia. Isu menonjol di kawasan Afrika yang mendapat perhatian internasional adalah aksi-aksi perompakan di perairan Somalia dan Teluk Aden, yang telah melibatkan militer dari 10 negara untuk turut mengatasinya. Resolusi DK PBB Nomor 1816 yang mengizinkan keterlibatan militer negara-negara asing, merupakan perkembangan terbaru dalam mengatasi permasalahan perompakan di laut, yang dikhawatirkan dapat menjadi preseden internasional untuk kasus-kasus

serupa, dan pada gilirannya dapat saja terjadi di Selat Malaka bila negara-negara pantai tidak dapat mengamankannya. Selain itu, keputusan *International Criminal Court* (ICC) tentang penangkapan Presiden Sudan, Omar Bashir, telah mengundang reaksi pro dan kontra dari masyarakat internasional, karena dikhawatirkan dapat mengganggu proses perdamaian yang tengah berlangsung.

d. Kawasan Asia.

- 1) Asia Timur. Ketegangan politik dan keamanan di kawasan Asia Timur tampak masih cukup tinggi dan tetap potensi menjadi *flash point* konflik antar-negara. Meskipun potensi konflik China dan Taiwan memperlihatkan tren menurun karena menguatnya hubungan baik kedua pemerintahan yang berkuasa saat ini, demikian pula dengan tetap terpeliharanya hubungan baik antara Jepang dan China. Namun ketegangan akibat isu senjata nuklir Korea Utara masih potensial terjadi. Sebagai kekuatan yang berpengaruh di kawasan, AS diprediksi akan berupaya untuk tetap mendukung *status quo* saat ini, terutama ketika perhatiannya tersita pada permasalahan ekonomi dalam negeri.
Perimbangan kekuatan militer di kawasan tetap bergeser kearah China, dalam arti modernisasi militer negara tersebut menjadi isu yang kerap kali mengundang reaksi dari negara-negara sekitar. Meskipun turut menghadapi krisis finansial, tren peningkatan anggaran pertahanan di kawasan, khususnya China masih berlanjut, sehingga pembangunan kekuatan militer negara tersebut akan selalu dicermati.
- 2) Asia Selatan. Pengaruh India di kawasan Asia Selatan meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan keberhasilan pembangunan militer negara tersebut dalam 5 tahun terakhir. Pengaruh India sebagai *regional player* terus menguat sehingga memungkinkan pada masa mendatang negara ini akan menjadi *global player* yang akhirnya diprioritaskan AS untuk mengimbangi pengaruh China di kawasan Asia Pasifik.
Disisi lain, kondisi Pakistan tetap diwarnai oleh gejolak politik dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah Pakistan lebih banyak memfokuskan pada masalah India. Menguatnya India sebagai kekuatan regional menyebabkan arah kebijakan dengan kedekatannya dengan AS dan posisi yang bersaing dengan China.
- 3) Asia Barat. Perkembangan politik dan keamanan di Irak sepanjang Tahun 2008 tetap belum memberi harapan akan terwujudnya stabilitas dan perdamaian di dalam negeri negara tersebut. Aksi-aksi kekerasan yang kini berdimensi perang saudara semakin menguat, seperti kasus-kasus kekerasan antar-sekte, seperti Sunni dan Syiah, dan kelompok-kelompok pejuang lainnya.
Pilihan terhadap solusi berdirinya dua negara yakni Israel dan Palestina (*two-state solution*) semakin menguat, terutama dengan dukungan pemerintahan AS saat ini. Akan tetapi, tindak kekerasan antara Hamas dengan tentara Israel tetap berlanjut, meski telah

disepakati gencatan senjata. Masih adanya konflik internal di pihak Palestina, menunjukkan masih sulitnya mewujudkan solusi tersebut. Janji pendekatan AS yang lebih terbuka kepada Iran membawa harapan baru terhadap penyelesaian isu program nuklir Iran yang tidak mengganggu stabilitas regional dan global. Namun kemajuan signifikan dalam isu ini akan tetap dipengaruhi oleh faktor kedekatan Rusia dengan Iran, sikap Iran terhadap Israel, hingga pendekatan UE dan PBB.

- 4) Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara telah dipandang sebagai kekuatan geopolitik baru dalam konstelasi politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik, sehingga akan terus berada ditengah-tengah persaingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar, seperti AS, Rusia, China dan lainnya. Stabilitas politik dan keamanan selain kemajuan ekonomi merupakan karakteristik menonjol di kawasan. Namun hingga kini masih terdapat sejumlah permasalahan yang dapat memicu ketegangan hingga *flash point* konflik, seperti menyangkut sengketa perbatasan dan klaim wilayah. Dalam Konteks stabilitas keamanan regional, sejumlah isu keamanan masih mewarnai kawasan ini, seperti konflik yang bersumber pada klaim teritorial, keamanan jalur pelayaran dan perdagangan, terorisme, *transnational crime* dan separatisme. Permasalahan perbatasan yang laten menimbulkan konflik, saat ini terlihat sedikit berkurang seiring dengan telah diputuskannya kepemilikan Pulau Batu Puteh bagi Singapura oleh *International Court of Justice* (ICJ) dan disepakati perbatasan maritim antara Indonesia dan Singapura di segmen barat. Meski demikian, klaim kepulauan Spratley dan Kepulauan Paracel, serta klaim perbatasan Indonesia dengan beberapa negara, seperti Malaysia terkait dengan klaim sepihak Malaysia atas perairan Ambalat, masih belum terselesaikan. Ratifikasi Piagam Asean oleh Pemimpin negara-negara di kawasan pada akhir Tahun 2008 membawa perubahan dalam pola interaksi dan dinamika di kawasan. Namun demikian perhatian terkait isu HAM dan demokrasi, seperti realisasi pembentukan badan HAM Asean masih cenderung dipandang pesimis para aktivis dan sejumlah organisasi internasional.

13. Lingkungan Strategis Nasional.

- a. **Ideologi.** Kencenderungan menurunnya kesadaran sebagian masyarakat Indonesia terhadap Pancasila, wawasan kebangsaan, serta nasionalisme masih berlanjut, yang dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan nasional dan mengancam kondisi ketahanan nasional.
- b. **Politik.** Dinamika perkembangan politik lokal maupun nasional berjalan cukup kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya cenderung semakin meningkat. Perkembangan politik nasional diperkirakan akan terus menghangat mendekati Pemilu legislatif dan Presiden Tahun 2009. Namun demikian stabilitas politik dalam negeri diperkirakan tetap cukup kondusif seiring dengan semakin membaiknya kondisi stabilitas keamanan. Perkembangan politik nasional

akan diwarnai dengan dinamika partai-partai politik yang bertarung memperebutkan kursi legislatif dan Presiden.

- c. **Ekonomi dan Sosial Budaya.** Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun dalam meningkatkan kinerja perekonomian, berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah, baik menyangkut kompetitif produk, rumitnya birokrasi, jaminan hukum dan keamanan hingga faktor eksternal lainnya seperti fluktuasi nilai tukar uang dan harga minyak dunia hingga krisis finansial global. Jika hal ini dapat diatasi, maka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah membutuhkan terobosan baru untuk membawa kemajuan signifikan.
- d. **Pertahanan dan Keamanan.** Seiring dengan semakin kondusifnya daerah-daerah rawan konflik dan separatis, serta stabilitas politik nasional yang semakin mantap, kecenderungan perkembangan situasi pertahanan keamanan pada masa mendatang diperkirakan akan semakin kondusif. Namun hal itu juga tergantung dari sejauh mana pemerintah dan seluruh elemen masyarakat mampu merespon dan meredam setiap permasalahan sosial masyarakat dan potensi ancaman dari dalam maupun dari luar. Terkait dengan pemilu legislatif dan Pilpres, mengingat situasi dalam negeri yang semakin menghangat menjelang pemilu Tahun 2009, maka peningkatan pengamanan perlu menjadi prioritas pertama.
- e. **Daerah Pasca Konflik dan Separatisme.** Perkembangan politik dan keamanan daerah konflik dan separatisme, yakni Papua, Maluku dan Poso relatif stabil, kecuali NAD yang mengalami peningkatan tindak kekerasan menjelang pemilu Tahun 2009. Secara khusus, perkembangan propinsi NAD Tahun 2010, akan bergantung pada hasil pemilu legislatif Tahun 2009, terutama dikaitkan dengan adanya indikasi upaya menguasai DPRD NAD. Di Papua, aktifitas gerakan separatis Papua, khususnya jalur politik secara intens tetap akan melakukan manuver politik dengan mengangkat isu-isu permasalahan sosial, HAM dan lingkungan serta persoalan-persoalan lain yang memiliki nilai politis, termasuk dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras dan antar-kelompok (SARA). Aktivitas politik lebih menonjol dibandingkan aktivitas senjata, maka insiden-insiden pengibaran bendera tampaknya akan terus mewarnai dinamika politik dan keamanan Papua ke depan. Situasi Maluku cenderung stabil, meski sempat terganggu akibat hasil Pilkada Maluku Tahun 2008. Namun demikian, gerakan provokasi kelompok FKM/RMS berupa aksi-aksi pengibaran bendera Benang Raja tampaknya masih akan mewarnai situasi di Ambon. Ditengah-tengah meningkatnya suhu politik di tingkat nasional dan lokal dalam menghadapi Pemilu 2009 tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan kelompok kepentingan untuk melakukan aksinya. Sementara itu, stabilitas politik dan keamanan Poso terus kondusif. Sikap tegas aparat keamanan terhadap para pelaku kerusuhan Poso Tahun 2007-2008 tampaknya berpengaruh signifikan terhadap situasi keamanan Poso. Selain itu adanya tindakan persuasif terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat tampaknya telah membawa kemajuan pada situasi damai diantara dua kelompok, dimana kehidupan masyarakat berangsur-angsur normal kembali.

14. **Potensi Ancaman.** Dari kecenderungan perkembangan lingkungan strategis global dan regional serta dinamika permasalahan di tanah air, maka sejumlah ancaman yang dihadapi Indonesia Tahun 2010 adalah :
- a. **Kedaulatan/Yurisdiksi.** Akibat belum selesainya proses toponimi penamaan pulau-pulau, adanya perbatasan darat dan maritim yang belum disepakati dengan negara tetangga.
 - b. **Konflik Etnis dan Agama.** Akibat masih tingginya gejala nasionalisme sempit ataupun pembelaan “kebenaran mayoritas” oleh kelompok tertentu serta masih lemahnya penegakan hukum.
 - c. **Kerusakan Lingkungan.** Akibat tidak terawasinya proses pemanfaatan dan lingkungan hidup, lambatnya langkah-langkah preventif serta belum terkoordinasinya langkah-langkah penanganan.
 - d. **Wawasan Kebangsaan.** Akibat penurunan kohesivitas dan degradasi kepercayaan terhadap pemerintah maupun elit-elit politik yang sering mengabaikan aspirasi rakyat.
 - e. **Konflik Politik.** Akibat pertentangan antara tokoh-tokoh, partai politik hingga kelompok kepentingan akibat hasil pemilu tidak memuaskan pihaknya ataupun gagal menghasilkan pemerintahan yang kuat, dalam arti didukung koalisi partai di parlemen yang mayoritas.
 - f. **Terorisme.** Akibat masih aktifnya gerakan perekrutan dan belum tertangkapnya sejumlah tokoh-tokoh kunci teroris, serta kelengahan aparat keamanan dan intelijen.
 - g. **Gerakan Radikal.** Akibat kelompok radikal masih leluasa melakukan aktivitas ilegal dan kegagalan proses radikalisme di kalangan rakyat.
 - h. **Kejahatan Lintas Negara.** Akibat masih belum terkoordinasinya pelaksanaan tugas dan fungsi instansi/aparat yang berwenang dan dorongan ekonomi yang semakin tinggi akibat krisis.
 - i. **Anggaran Pertahanan.** Akibat semakin terbatasnya sumber daya keuangan negara yang terganggu krisis finansial dan menyebabkan anggaran pertahanan tetap dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi bukan pada pertimbangan strategi politik.

BAB IV

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN NEGARA

15. **Sasaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010.**
- a. Terwujudnya Postur dan Struktur Pertahanan menuju *Minimum Essential Force*/MEF yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal.
 - b. Terdayagunanya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan.

- c. Menurunnya angka gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan udara nasional.
- d. Terpantau dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.
- e. Terlindunginya informasi negara.
- f. Terpantau dan teridentifikasinya ancaman keamanan nasional.
- g. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional dari sudut pandang Hankamneg yang tepat waktu.

16. Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010.

- a. Mewujudkan postur dan struktur menuju *Minimum Essential Force*/MEF yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal meliputi :
 - 1) Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang terintegrasi.
 - 2) Pemantapan gelar pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau terdepan dan wilayah penyangga.
 - 3) Mengembangkan kekuatan dan kemampuan serbu (*Striking force*).
 - 4) Meningkatkan kesejahteraan prajurit.
 - 5) Percepatan pembentukan komponen bela negara.
- b. Pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan meliputi :
 - 1) Penyusunan *Blue Print* beserta *Road Map*.
 - 2) Peningkatan penelitian dan pengembangan.
 - 3) Penyusunan dan penetapan kerangka finansial.
- c. Peningkatan kapasitas dan operasional pengawasan, penindakan secara cepat dan tepat serta penegakan hukum di laut.
- d. Pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui pemantapan tata kelola pecegahan dan penanggulangan tindak terorisme yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen.
- e. Peningkatan perlindungan informasi negara melalui peningkatan tata kelola pengumpulan, penyimpanan, transmisi dan penerimaan informasi negara.
- f. Peningkatan pemantauan dan deteksi dini melalui peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen.
- g. Meningkatkan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan.

17. Kegiatan Prioritas Pembangunan Pertahanan Negara.

- 1) Peningkatan profesionalisme prajurit melalui intensifikasi kegiatan pendidikan dan latihan guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan.
- 2) Peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan kesehatan yang memadai.
- 3) Program dan kegiatan pokok yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui upaya mensinergikan kegiatan yang melibatkan instansi terkait.
- 4) Memperpanjang usia pakai, penggantian Alutsista kritis, pengadaan Munisi Kaliber Kecil (MKK) dan Munisi Kaliber Besar (MKB) serta penyediaan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri.
- 5) Melanjutkan kegiatan yang bersifat tahun jamak (*multi years*) dan penyediaan anggaran yang bersifat mengikat meliputi gaji, tunjangan, pinjaman luar/dalam negeri dan lain-lain.
- 6) Meningkatkan kerja sama pengelolaan wilayah perbatasan negara, pulau kecil terluar dan daerah rawan konflik.
- 7) Penguatan kerja sama pertahanan dalam kawasan regional dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia dalam rangka meningkatkan CBM.

18. Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2010. Rencana kebutuhan anggaran Pertahanan Negara pada Tahun 2010 yang diusulkan melalui Panprogar Dephan dan TNI meliputi kebutuhan ideal sebesar Rp. 158.156,17 Miliar dan kebutuhan minimal sebesar Rp. 85.200,32 Miliar.

19. Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2010.

a. Alokasi anggaran sesuai Surat Edaran Bersama Menneg PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 dan Nomor : SE-1223/MK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 sebesar Rp. 36.488,68 Miliar setara 42,82% dari usulan.

b. Rincian alokasi pagu anggaran Tahun 2010 “Per Program” sebagai berikut :

1) Penerapan Pem yg baik	Rp. 21.473,23 Miliar
2) Banghan Integratif	Rp. 1.107,24 Miliar
3) Banghan Matra Darat	Rp. 2.515,74 Miliar
4) Banghan Matra Laut	Rp. 1.862,55 Miliar
5) Banghan Matra Udara	Rp. 1.768,48 Miliar
6) Gak Daulat & Jaga Utuh Wil NKRI	Rp. 961,44 Miliar
7) Bang Bela Negara	Rp. 110,14 Miliar

8)	Bang Sisstrahan	Rp.	91,66 Miliar
9)	Bang Industri Pertahanan	Rp.	6.499,38 Miliar
10)	Kermamil Internasional	Rp.	43,19 Miliar
11)	Litbanghan	Rp.	27,46 Miliar
12)	Operasi Bhakti TNI	Rp.	28,17 Miliar

c. Rincian alokasi pagu anggaran Tahun 2010 “Per Unit Organisasi (UO)” sebagai berikut :

1)	Dephan.	Rp.	7.435,28 Miliar
	a) Penerapan Pem yg baik	Rp.	720,37 Miliar
	b) Bang Bela Negara	Rp.	110,13 Miliar
	c) Bang Sisstrahan	Rp.	91,66 Miliar
	d) Bang Industri Pertahanan	Rp.	6.499,38 Miliar
	e) Kermamil Internasional	Rp.	1,47 Miliar
	f) Litbanghan	Rp.	12,27 Miliar
2)	Mabes TNI.	Rp.	3.993,22 Miliar
	a) Penerapan Pem yg baik	Rp.	1.977,43 Miliar
	b) Banghan Integratif	Rp.	1.107,24 Miliar
	c) Gak Daulat & Jaga Utuh Wil NKRI	Rp.	898,11 Miliar
	d) Kermamil Internasional	Rp.	3,77 Miliar
	e) Litbanghan	Rp.	1,56 Miliar
	f) Operasi Bhakti TNI	Rp.	5,11 Miliar
3)	TNI AD	Rp.	16.761,07 Miliar
	a) Penerapan Pem yg baik	Rp.	14.185,25 Miliar
	b) Banghan Matra Darat	Rp.	2.515,74 Miliar
	c) Gak Daulat & Jaga Utuh Wil NKRI	Rp.	26,28 Miliar
	d) Kermamil Internasional	Rp.	10,98 Miliar
	e) Litbanghan	Rp.	8,15 Miliar
	f) Operasi Bhakti TNI	Rp.	14,67 Miliar
4)	TNI AL	Rp.	5.011,60 Miliar
	a) Penerapan Pem yg baik	Rp.	3.078,11 Miliar
	b) Banghan Matra Laut	Rp.	1.862,55 Miliar
	c) Gak Daulat & Jaga Utuh Wil NKRI	Rp.	36,68 Miliar
	d) Kermamil Internasional	Rp.	21,17 Miliar
	e) Litbanghan	Rp.	4,90 Miliar
	f) Operasi Bhakti TNI	Rp.	8,19 Miliar
5)	TNI AU	Rp.	3.287,51 Miliar
	a) Penerapan Pem yg baik	Rp.	1.512,08 Miliar
	b) Banghan Matra Udara	Rp.	1.768,47 Miliar

c)	Gak Daulat & Jaga Utuh Wil NKRI	Rp.	0,37 Miliar
d)	Kermamil Internasional	Rp.	5,80 Miliar
e)	Litbanghan	Rp.	0,58 Miliar
f)	Operasi Bhakti TNI	Rp.	0,21 Miliar

d. Alokasi pagu PHLN/KE sebesar Rp. 4.257,10 Miliar dan alokasi Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp. 800,00 Miliar.

e. Program, kegiatan dan anggaran prioritas nasional :

1)	Banghan Integratif	Rp.	180,00 Miliar
	a) Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana	Rp.	30,00 Miliar
	b) Pengembangan Materiil Integratif	Rp.	50,00 Miliar
	c) Perbaikan/pemeliharaan/ penggantian Alutsista TNI	Rp.	100,00 Miliar
2)	Banghan Matra Darat	Rp.	525,00 Miliar
	a) Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana	Rp.	300,00 Miliar
	b) Pengembangan Materiil Matra Darat	Rp.	100,00 Miliar
	c) Perbaikan/pemeliharaan/ penggantian Alutsista TNI	Rp.	125,00 Miliar
3)	Banghan Matra Laut	Rp.	440,00 Miliar
	a) Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana	Rp.	90,00 Miliar
	b) Pengembangan Materiil Matra Laut	Rp.	100,00 Miliar
	c) Perbaikan/pemeliharaan/ penggantian Alutsista TNI	Rp.	250,00 Miliar
4)	Banghan Matra Udara	Rp.	645,00 Miliar
	a) Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana	Rp.	125,00 Miliar
	b) Pengembangan Personel Matra Udara	Rp.	70,00 Miliar
	c) Pengembangan Materiil Matra Udara	Rp.	100,00 Miliar
	d) Perbaikan/pemeliharaan/ penggantian Alutsista TNI	Rp.	350,00 Miliar
5)	Gaklat & Jaga Utuh Wil NKRI	Rp.	40,00 Miliar
	- Pembangunan pos di wilayah Perbatasan dan pulau-pulau terluar	Rp.	40,00 Miliar
6)	Bang Bela Negara	Rp.	10,00 Miliar
	- Pengembangan Sistem Bela Negara	Rp.	10,00 Miliar

7)	Bang Sisstrahan	Rp.	10,00 Miliar
	- Pengembangan Strategi Raya Pertahanan (SDR)	Rp.	10,00 Miliar
8)	Bang Industri Pertahanan	Rp.	6.321,38 Miliar
	a) Pengembangan materiil industri pertahanan	Rp.	800,00 Miliar
	b) Pengadaan Alutsista TNI	Rp.	5.521,38 Miliar

f. Beberapa kegiatan yang harus dibatasi, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya dan acara seremonial.
- 2) Pemasangan telepon baru, kecuali untuk Satker yang belum memiliki saluran telepon.
- 3) Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tupoksi (antara lain mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan).
- 4) Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti kendaraan taktis, khusus, tempur dan penggantian kendaraan rusak berat serta pembentukan Satuan Kerja baru.
- 5) Pengeluaran lain-lain yang sejenis atau serupa tersebut di atas.
- 6) Pergeseran anggaran kecuali sangat mendesak.

**BAB V
PENUTUP**

- 20. Penutup.** Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara Tahun 2010 merupakan dokumen yang harus digunakan sebagai acuan oleh semua Unit Organisasi dan Satuan Kerja yang merupakan unsur pelaksana Kebijakan Menteri Pertahanan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 April 2009

MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO